

## Peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Meningkatkan Akreditasi Pesantren di Kabupaten Bener Meriah

Ahmad Yani<sup>1\*</sup>, Muhammad Anggung Manumanoso Prasetyo<sup>2</sup>,

<sup>1</sup>MPU Bener Meriah; <sup>1</sup> IAIN Lhokseumawe

email: ahmadelbustany@gmail.com; anggung@iainlhokseumawe.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.47766/idarrah.v5i1.1444>

### ABSTRACT

**Key Words:**

*Accreditation Management; Pesantren-Based Management; Ulama Consultative Assembly; Performance Improvement;*

Dayah accreditation is one of the efforts in ensuring the quality of pesantren education services. One of the strategies of pesantren in achieving effective accreditation results is collaborating with external parties. MPU and pesantren are organizations that have the same orientation, namely ensuring the implementation of values based on Islamic law. The research method used is a qualitative diary method. Sources of informants are MPU management and several Islamic Boarding School leaders. The results showed that the MPU's role in the accreditation of the dayah included (2) advisors and policy deliberations related to the fulfillment of educational service standards as the main instrument of dayah accreditation; (2) strengthening external support through optimizing the dayah committee and strengthening organizational committees. The social implications of this research result in collaborative efforts in maintaining community stability. Through the accreditation system, it is expected to be able to improve the quality of education services held by Islamic boarding schools.

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**

*Manajemen Akreditasi; Manajemen Berbasis Pesantren; Majelis Permusyawaratan Ulama; Peningkatan Kinerja;*

Akreditasi dayah merupakan salah satu upaya dalam penjaminan mutu layanan pendidikan pesantren. Strategi pesantren dalam mencapai hasil akreditasi yang efektif salah satunya bekerjasama dengan pihak eksternal. MPU dan pesantren merupakan organisasi memiliki kesamaan orientasi yaitu menjamin terlaksananya penerapan nilai-nilai berbasis syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berjenis diary method. Sumber informan adalah pengurus MPU dan beberapa Pimpinan Pesantren. Hasil penelitian menunjukkan peranan MPU dalam akreditasi dayah diantaranya (2) pembimbing dan pemberi pertimbangan kebijakan berkaitan pemenuhan standar layanan pendidikan sebagai insrumen utama akreditasi dayah; (2) penguat dukungan eksternal melalui optimalisasi komite dayah dan penguatan komite organisasional. Implikasi social penelitian ini menghasilkan upaya kolaboratif dalam menjaga stabilitas masyarakat. Melalui system akreditasi diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan Pendidikan yang diselenggarakan pesantren.

## PENDAHULUAN

Terbitnya UUD Pesantren pada tahun 2019 menjadi bukti butuh waktu sangat panjang bagi pemerintah untuk mengakui eksistensi pesantren. Sebagaimana penelitian Badruddin memandang perilaku diskriminatif pemerintah terhadap pesantren. (Badrudin, Purwanto, & Siregar, 2017). Padahal banyak lulusan pesantren terbukti telah berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan bangsa (Setyawan, 2019) (Wahyuddin, 2017). Pada tataran operasional peningkatan mutu pesantren dipengaruhi oleh factor kebijakan pemerintah (Abdulloh, 2019).

Pesantren yang disebut Dayah oleh masyarakat Aceh merupakan bagian integral dari ekosistem masyarakat Aceh (Buto, 2015)da. Mengacu pada definisi pesantren yang lahir dari Rahim masyarakat dan berperan dalam membentuk budaya masyarakat (Dhofier, 1984). Dayah di Aceh secara tipologis terbagi menjadi tiga, Dayah Salafy, Dayah Terpadu dan Dayah tahfidz (Qanun Aceh No. 9 Tahun 2018, 2018).

Kompetisi yang semakin kompetitif menuntut pesantren untuk menjaga kualitas (Situmorang, 2018). Sebagai upaya dalam membentuk dayah yang kompetitif pemerintah hadir melalui Dinas Pendidikan Dayah dalam melaksanakan sistem akreditasi Dayah. Tujuannya, sebagai komponen dalam perencanaan pengembangan dayah dan indicator pertimbangan dalam bantuan penyelenggaraan operasional dayah (Peraturan Gubernur Aceh No. 69 Tahun 2019, 2019).

Dengan sistem yang semakin formal terkait akreditasi maka setiap dayah dituntut untuk meningkatkan pengelolannya agar mendapatkan akreditasi yang ideal sehingga berdampak signifikan bagi dayah tersebut (Usman, 2021). Dalam perkembangannya, pondok pesantren diyakini mampu memberikan efek positif bagi pembentuk individu yang berkarakter sehingga mampu melakukan perubahan yang positif (Hamdan, 2017). Hal ini dikarenakan selain dilatih untuk mempraktekan nilai-nilai keagamaan dalam aktivitas sehari-hari, santri juga dibiasakan untuk belajar hidup mandiri.

Eksistensi pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata, kehadiran pesantren menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat. Itulah sebabnya, posisi dan keberadaan pesantren mendapatkan tempat yang penting karena dianggap mampu memberi pengaruh bagi kehidupan sebagian besar lapisan masyarakat. Keberadaan dan penyebaran pesantren di wilayah Indonesia terus bermunculan dan mengalami peningkatan jumlah yang signifikan (Basyit, 2017). Pada awal abad ke-21, selain terdapat pesantren-pesantren yang telah bertebaran sebelumnya sejak abad ke-19, di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua juga banyak bermunculan dan berdiri pesantren-pesantren baru yang tentu saja akan menambah khazanah perbendaharaan pesantren (Musthofa, 2015) (Daulay, 2001).

Sangat disayangkan apabila kualitas Lembaga Pendidikan Islam Khususnya pesantren jika tidak mendapatkan perhatian khusus dalam hal peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan (Umiarso & Zazin, 2011).

---

Sebagaimana layaknya lembaga pendidikan lainnya di tanah air, Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah menjadi wadah para Ulama bermusyawarah dalam urusan keummatan mempunyai hubungan sangat erat dengan pesantren. Tidak bisa dinafikan lagi bahwa keberadaan lembaga pesantrenlah yang berperan dalam mencetak para ulama. Demikian juga adanya di Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah, dimana hampir 100% anggota majelisnya merupakan alumni dayah dari berbagai daerah, baik alumni pesantren-pesantren di Aceh, maupun luar Aceh bahkan dari luar Negeri.

Hubungan antara MPU dan pesantren di kabupaten ini hampir seperti dua sisi mata uang, dimana anggota MPU adalah alumni pesantren bahkan sudah menjadi pimpinan-pimpinan pesantren di daerah tersebut (Nurlaila & Zulihafnani, 2019). Sehingga Peran MPU dalam meningkatkan akreditasi pesantren sangat besar, meliputi berbagai aspek kehidupan baik di bidang agama, pendidikan, dan sosial. Peran-peran itu sangat diutamakan, mengingat saat ini mulai nampak penurunan akhlak dan tingkah laku di kalangan generasi muda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah peran langsung MPU dalam meningkatkan akreditasi pesantren di kabupaten Bener Meriah serta sejauh mana peran yang sudah dilakukan oleh MPU dalam meningkatkan Akreditasi pesantren di Kabupaten Bener Meriah (Husaini, 2018).

Jati diri pesantren sebagai konstruk masyarakat sosial menjadi solusi dalam membentuk stabilitas tatanan masyarakat sosial yang damai adil dan bermartabat (Asrori, 2020). Dalam proses upaya akreditasi pesantren, penelitian ini menjadi penting untuk mendengar, menelaah, dan membawa aspirasi dunia pesantren agar posisi pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan mau tak mau harus turut pula ambil bagian, memposisikan diri dan membuktikan sebagai lembaga yang juga mampu mengakomodasi tuntutan di era globalisasi, yaitu menciptakan manusia yang tidak hanya bertakwa tetapi juga berilmu, memiliki SDM tinggi plus berakhlakul karimah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berjenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau kualifikasi lainnya (Octavia, 2019) (Bamberger, 2000). Penelitian ini dilakukan di Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Penentuan objek melalui beberapa pertimbangan antara lain belum pernah diadakan penelitian sejenis tentang Peran MPU Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan Akreditasi Pesantren. Merupakan tempat bekerja peneliti sementara sehingga cukup memudahkan peneliti dalam menghimpun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian dilakukan pada bulan November 2020. Kegiatan penelitian dilakukan melalui tahap persiapan,

pelaksanaan penelitian (terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi) dan penyusunan laporan hasil penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi, melalui metode observasi, penulis belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Kedua, wawancara kepada Tgk. Mukhlis Samudra, S.Pd -Ketua Komisi B MPU Bener Meriah bidang pendidikan dan Tgk. Anwar Sadat -Sekretaris Komisi B MPU Kab. Bener Meriah. Sedangkan melalui studi Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk data historis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah semua data yang berkaitan dengan penyusunan akreditasi sekolah menengah, dimulai dari apa masing-masing tugas pokok dan fungsi dari kesemua komisi yang ada pada MPU kabupaten Bener Meriah hingga mengerucut ke tugas pokok dan fungsi komisi B yang membidangi tentang Pendidikan sesuai tujuan penelitian. Analisis data digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan tentang Peran MPU dalam Meningkatkan Akreditasi Pesantren di Kantor Sekretariat MPU Kabupaten Bener Meriah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam undang-undang Sistem pendidikan nasional akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Disamping itu, akreditasi merupakan semacam pengakuan formal yang dianugerahkan oleh badan akreditasi terkait hasil kompetensi dari suatu lembaga atau organisasi dalam menjalankan kegiatan penilaian kesesuaian tertentu dalam bidang pendidikan serta manajemen kelembagaan. Akreditasi juga untuk membantu memenuhi kualitas organisasi pendidikan kepesantrenan guna terpenuhinya persyaratan peraturan dan persyaratan yang relevan.

Sementara itu akreditasi pesantren diarahkan dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan peningkatan berkelanjutan dalam upaya pencapaian kinerjanya. Sama halnya lembaga pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi, sesungguhnya akreditasi merupakan suatu pengakuan publik atau pengakuan pihak luar terhadap lembaga pesantren yang bersangkutan. Pengakuan ini tentu menggunakan kriteria tertentu dan bertujuan untuk memberikan garansi kepada masyarakat bahwa pesantren bersangkutan pantas menyelenggarakan proses belajar mengajar. Jaminan output yang dihasilkan pesantren dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah atau bahkan dunia kerja (Scheerens, Luyten, & Ravens, 2011).

### Tinjauan Manfaat Akreditasi bagi Pesantren

Secara umum tujuan akreditasi adalah untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja suatu lembaga serta untuk menentukan tingkat kelayakan suatu lembaga tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan, dan sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di lembaga pendidikan islam atau pesantren tersebut.

---

Selain itu tujuan dari akreditasi sekolah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 087/U/2002, yang mempunyai tujuan, yaitu: (1) memperoleh gambaran kinerja sekolah sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu; (2) menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Maksud akreditasi tersebut adalah bahwa hasil dari akreditasi itu antara lain: (a) memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya; (b) memberikan semacam jaminan untuk publik bahwa sekolah itu telah terakreditasi dan memberikan layanan pendidikan yang sesuai standar akreditasi secara nasional, dan (c) Memberikan layanan kepada publik bahwa siswa mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan persyaratan standar nasional (Nasional, 2005).

Akreditasi memberikan manfaat bagi pesantren ditinjau dari beberapa aspek. Akreditasi dapat dijadikan acuan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan rencana pengembangan pesantren. Secara spesifik hasil akreditasi dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan dalam hal pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah. Manfaat lain yang dapat diperoleh adalah sebagai pendorong motivasi peningkatan kualitas pesantren secara gradual. Mengacu pada konsep pesantren efektif, akreditasi sebagai bagian daripada mutu menjadi komponen strategis dalam menciptakan stabilitas system sehingga mendukung pesantren dalam melakukan pengembangan kapasitas (*capacity building*), asumsi tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Prasetyo, et al., (2020) dan Laila, (2015).

Pola pengelolaan pesantren efektif dapat diamati melalui input - rekrutmen murid dengan standar biasa- kemudian dikelola dengan system pendidikan yang baik sehingga melahirkan output yang berkualitas. Pesantren bermutu kemudian memberikan daya tawar bagi masyarakat sehingga secara simultan mendapat dukungan dari masyarakat maupun pemerintah berupa moral, dana, bahkan menyediakan bantuan tenaga guru yang profesional.

Bagi pimpinan sendiri, akreditasi memberikan manfaat sebagai bahan informasi untuk pemetaan indikator keberhasilan kinerja personal dalam periode tertentu. Hasil penilaian kinerja kemudian dijadikan bahan masukan untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Senada dengan itu, akreditasi

Akreditasi bagi guru dan tenaga kependidikan tampak jelas manfaat akreditasi bagi kelompok guru dan tenaga kependidikan adalah sebagai dorongan untuk selalu meningkatkan diri dari bekerja keras untuk memberi layanan yang terbaik bagi siswanya.

Sedangkan bagi masyarakat atau wali murid informasi yang akurat untuk menyatakan kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh setiap sekolah. Bukti bahwa mereka menerima pendidikan yang berkualitas tinggi, sehingga siswa mempunyai kepercayaan terhadap dirinya bahwa ia mampu masuk dan bersekolah di lembaga pendidikan yang terakreditasi nasional.

### **Peran MPU bagi Akreditasi Pesantren**

Menjadi acuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan/peningkatan kualitas pendidikan di daerah masing-masing. Bahan informasi penting untuk penyusunan anggaran pendidikan secara umum, dan khususnya anggaran pendidikan yang terkait dengan rencana biaya operasional Badan Akreditasi Sekolah di tingkat Dinas dan Kementerian Agama.

Pemerintah sebagai bahan masukan untuk pengembangan sistem akreditasi sekolah di masa mendatang dan alat pengendalian kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang bersifat nasional. Sumber informasi tentang tingkat kualitas layanan pendidikan yang dapat dipergunakan sebagai acuan untuk pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kinerja pendidikan secara makro. Bahan informasi penting untuk penyusunan anggaran pendidikan secara umum di tingkat nasional, dan khususnya program dan penganggaran pendidikan yang terkait dengan peningkatan mutu.

Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah Mempunyai peran tidak langsung dalam Meningkatkan Akriditasi Pesantren di Kabupaten Bener Meriah. Sesuai dengan amanah Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Peran-peran tersebut, Pertama, memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan kemasyarakatan. Kedua, melakukan rapat koordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini Dinas Dayah yang berada di lingkungan Kabupaten Bener Meriah. Dalam rapat tersebut MPU berhak memberikan masukan, pertimbangan dan saran dalam meningkatkan akreditasi Pesantren di kabupaten Bener Meriah. Ketiga, sesuai dengan amanah qanun tersebut, MPU Kabupaten tidak memiliki wewenang untuk melakukan eksekusi. Namun MPU Kabupaten berhak dan memiliki wewenang untuk memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada lembaga eksekutif dan legislatif baik diminta atau tidak diminta terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan daerah yang berdasarkan syariat islam.

Bisa dikatakan tidak ada peran langsung MPU dalam Meningkatkan Akriditasi Pesantren di Bener Meriah. Karena semua tugas dan kewenangan MPU telah diatur dan dituangkan dalam sebuah Qanun Pemerintahan Aceh. Hal ini sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama yang tertuang dalam Qanun Aceh nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Di Pasal 4 berbunyi "MPU dan MPU kabupaten/kota berfungsi: (a) memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan; (b) memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Sebagai mitra kerja pemerintah daerah MPU berhak memberikan pertimbangan dan nasihat kepada pemerintah daerah baik diminta atau tidak diminta.

Dalam konteks penelitian kebijakan yang dihasilkan pesantren mengarah kepada pembentukan nilai-nilai keIslaman melalui dunia Pendidikan. MPU

---

mampu memberikan pertimbangan terkait harmonisasi kebijakan tersebut, khususnya dampak kebijakan pesantren terhadap masyarakat pada umumnya. MPU juga berperan dalam memberikan nasehat kepada pengelola pesantren apabila ada kebijakan yang memberatkan masyarakat.

Problematika akreditasi berkaitan dengan pemenuhan sarana dan prasarana, dalam hal ini pesantren membutuhkan dukungan stakeholder atau masyarakat eksternal. Dukungan mengarah kepada pemenuhan materi atau pembangunan jaringan kelembagaan. Secara ideologis pesantren berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat, maka peningkatan sarana prasarana pesantren juga menjadi perhatian masyarakat. Dominasi peran tersebut semakin terasa di Aceh, alasannya mayoritas tokoh yang memiliki pengaruh di masyarakat merupakan lulusan pesantren. Peran sentral lulusan pesantren terhadap perkembangan masyarakat di Aceh sebagaimana penelitian yang dilakukan Zulfikar dan Hanafiah (Zulfikar et al., 2020) (Hanafiah, 2018).

Terkait kewenangan MPU kabupaten Bener Meriah juga telah tertuang dalam pasal 5 ayat 2 bahwa MPU kabupaten/kota mempunyai kewenangan (a) melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU; (b) memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. Salah satu orientasi pengembangan pesantren adalah penguatan dalam bidang ekonomi (Prasetyo, 2017), dalam konteks penelitian MPU juga berperan dalam peningkatan ekonomi yang Islami melalui serangkaian pembinaan serta Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan bekerja sama dengan pihak eksternal atau dinas terkait seperti dinas koperasi dan dinas dayah kabupaten.

Dalam hal tugasnya di dalam pemerintahan dan ummat MPU hanya sebagai pemberi masukan, pertimbangan dan saran tidak lebih, jadi intinya Majelis Permusyawaratan Ulama baik yang ada di Provinsi maupun yang dikabupaten tidak memiliki tugas eksekusi, karena tugas ini adalah wewenang dari lembaga eksekutif itu sendiri. Hal ini tertuang di dalam pasal 6 ayat 2 qanun tersebut bahwa MPU kabupaten/kota mempunyai tugas (a) memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam; (b) melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah sesuai syariat Islam; (c) melakukan pengkaderan ulama; d). melakukan pemantauan serta kajian mendalam terhadap dugaan-dugaan adanya penyimpangan aqidah maupun kegiatan keagamaan yang dapat meresahkan masyarakat serta membuatkan laporannya kepada MPU Provinsi.

Majelis Permusyawaratan Ulama di tingkat Kabupaten / kota juga memiliki tiga komisi dengan bidang masing-masing. Pada pasal 24 disebutkan (1) Seluruh anggota MPU Kabupaten/Kota dibagi dalam komisi-komisi (2) Komisi-komisi terdiri dari: a). Komisi A Bidang Kajian Qanun Kabupaten/Kota dan Perundang-undangan lainnya; b). Komisi B Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan serta Ekonomi Umat, dan c). Komisi C Bidang Dakwah, Pemberdayaan Keluarga serta Generasi-generasi Muda milenial." menyangkut

tugas masing-masing komisi tersebut, MPU Kabupaten dapat melakukan rapat koordinasi dengan dinas terkait. Diantaranya adalah Dinas Pendidikan kabupaten Bener Meriah juga dinas dayah yang berada di lingkungan Kabupaten Bener Meriah yang secara langsung sebagai naungan seluruh dayah di kabupaten tersebut. Sehingga dalam rapat tersebut MPU berhak memberikan masukan, pertimbangan dan saran dalam meningkatkan akreditasi Pesantren di kabupaten Bener Meriah.

### **Perwujudan Komitmen Organisasional**

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang mempertahankan nilai-nilai keIslaman melalui proses pendidikan. Sedangkan MPU merupakan organisasi yang menjamin keterlaksanaan nilai-nilai keIslaman di tengah masyarakat social. Pola kausal antara pesantren dan MPU satu sebagai sarana pembentuk output generasi Islam satu sebagai fasilitator aktualisasi dari output tersebut. Hubungan tersebut menciptakan garis komitmen dalam penjagaan nilai keIslaman.

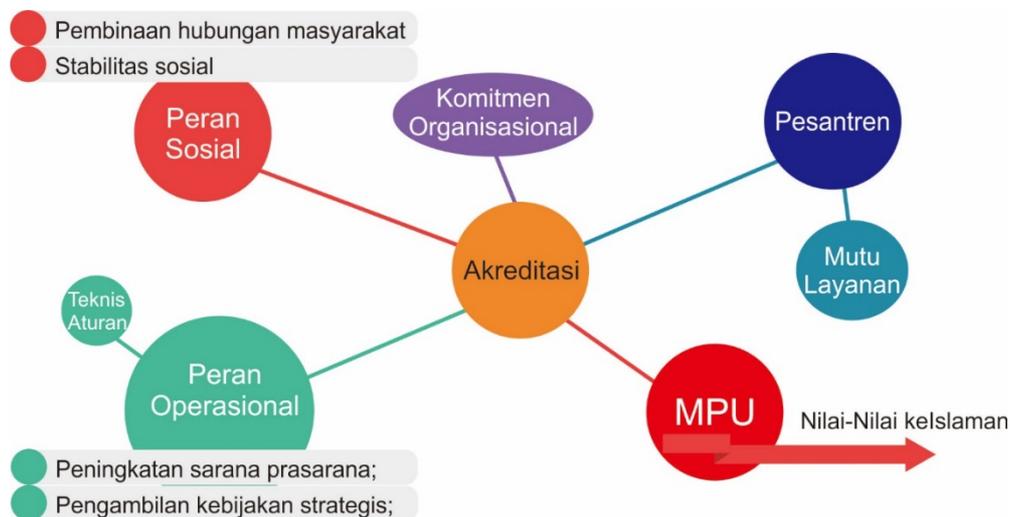
Dalam kajian manajemen MPU sebagai organisasi dituntut untuk memiliki komitmen dalam pelaksanaan nilai-nilai keIslaman tersebut. Komitmen organisasional adalah identifikasi, keterlibatan, keterikatan dan kesetiaan yang diekspresikan oleh pegawai terhadap organisasi. Dosen yang memiliki komitmen yang tinggi akan menunjukkan sikap loyalitas terhadap organisasi, dan akan berupaya untuk berusaha dengan optimal mencapai tujuan organisasi. Komitmen organisasi dimaknai sebagai orientasi hubungan antara individu dengan organisasinya. Orientasi hubungan di internalisasikan dalam bentuk loyalitas terhadap tugas, dan keterlibatan dosen dalam organisasi, yang ditunjukkan dengan sikap profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang disepakati bersama dalam organisasi.

Secara konseptual komitmen organisasional terbagi ke dalam 3 komponen yaitu komitmen afektif, komitmen keberlanjutan, dan komitmen normatif. Komitmen afektif mengacu pada ikatan emosional individu dengan pesantren dalam persiapan terhadap pelaksanaan proses akreditasi; komitmen berkelanjutan berkaitan dengan pertimbangan biaya dan resiko atas hasil akreditasi; dan komitmen normatif berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab individu dalam penyelenggaraan akreditasi.

Komitmen normatif yang tinggi dapat diwujudkan melalui kehadiran guru dan karyawan dalam berbagai aktivitas persiapan menghadapi akreditasi, menaati berbagai aturan pesantren, penyediaan pemenuhan data yang menjadi instrument penilaian akreditasi, memberi kontribusi melalui kerja akreditasi, kerja sama dalam tim akreditasi, saling mendukung sesama tim akreditasi, menampilkan kualitas kerja yang prima dan optimal. Komitmen itu juga membutuhkan kesetiaan kepada pesantren, dalam hal ini pengurus MPU dengan niat tulus dan ikhlas dalam memberikan pertimbangan yang konstruktif terhadap pesantren dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang bermutu (Bashori, 2017).

Faktor komitmen dan loyalitas dipandang penting karena komitmen berkaitan dengan janji dan kesetiaan atau tekat yang kuat untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan tanggungjawab (Siregar, 2017) (Rosita & Musnaini, 2020). Sehingga guru yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi akan mewajibkan diri untuk tetap setia, penuh tanggungjawab, bekerja dengan optimal, memiliki sikap yang tangguh, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disepakati dalam organisasi (Salabi, 2021).

Konflik merupakan wujud dari interaksi individu dengan individu, atau antar kelompok yang tujuannya berbeda bahkan berlawanan sehingga orang lain tidak sejalan dengan tujuan tersebut dan dianggap sebagai penghambat terhadap pencapaian tujuan (Guerra, Martínez, Munduate, & Medina, 2005).



Gambar 1: Novelty Penelitian

Gambar 1 menunjukkan bahwa pesantren dan MPU secara organisatoris memiliki kesamaan tujuan yaitu penjaminan terhadap pelaksanaan nilai-nilai berbasis keIslaman. Pendekatan berorientasi tujuan tertuang dalam komitmen organisasional dalam penyelenggaraan layanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Dalam skala mikro, kehadiran pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan mutu pesantren dibuktikan melalui kebijakan Akreditasi Dayah yang mendapat respon positif dari pengelola lembaga dayah. Strategi pencapaian akreditasi yang unggul dapat dilakukan melalui Kerjasama dengan pihak eksternal (MPU) dalam beberapa aspek yaitu, (1) peran social dalam pembinaan hubungan kemasyarakata dan penciptaan stabilitas social; (2) peran operasional dalam penggalangan dukungan dalam peningkatan sarana prasarana serta pengambilan kebijakan strategis. Pola kausal antara pesantren dan MPU satu sebagai sarana pembentuk output generasi Islam satu sebagai fasilitator aktualisasi dari output tersebut. Hubungan tersebut menciptakan garis komitmen dalam penjagaan nilai keIslaman.

Penelitian ini berimplikasi bagi pengembangan konseptual dan gagasan masa depan yang berkontribusi pada bidang manajemen pendidikan. Secara spesifik, implikasi sosial secara social dalam pembangunan strategi kemitraan yang berorientasi pada keberlanjutan.

## KESIMPULAN

Kebijakan akreditasi dayah menjadi sebuah upaya dalam penjaminan mutu layanan Pendidikan pesantren. MPU dan pesantren merupakan organisasi memiliki kesamaan orientasi yaitu menjamin terlaksananya penerapan nilai-nilai berbasis syariat Islam. Secara sosial MPU dan pesantren berperan dalam menciptakan stabilitas masyarakat sosial. Kontribusi MPU dalam penjaminan mutu layanan pesantren dapat ditinjau melalui beberapa aspek, sebagai pembimbing dan pemberi pertimbangan kebijakan berkaitan dengan penerapan nilai-nilai keIslaman; berperan dalam menjaga harmonisasi pesantren dengan masyarakat eksternal; membangun komitmen organisasional dalam penjaminan mutu layanan Pendidikan pesantren. Melalui system akreditasi diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan Pendidikan yang diselenggarakan pesantren.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, M. (2019). Dampak Politik Kebijakan Peraturan Pemerintah Terhadap Eksistensi Pesantren. *Jurnal Al-Murabbi*, 5(1), 92–102. <https://doi.org/10.35891/amb.v5i1.2110>
- Asrori, S. (2020). Lanskap Moderasi Keagamaan Santri, Refleksi Pola Pendidikan Pesantren. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 1(1), 16–26. <https://doi.org/10.15408/jisi.v1i1.17110>
- Badrudin, B., Purwanto, Y., & Siregar, C. N. (2017). Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 15(1), 233–272. <https://doi.org/doi.org/10.31291/jlk.v15i1.522>
- Bamberger, M. (2000). *Integrating Quantitative and Qualitative Research in Development Projects: Lessons from the field*. The World Bank.
- Bashori. (2017). Modernisasi Lembaga Pendidikan Pesantren Perspektif Azyumardi Azra. *Nadwa*, 11(2), 269. <https://doi.org/10.21580/nw.2017.11.2.1881>
- Basyit, A. (2017). *Pembaharuan Model Pesantren: Respon terhadap Modernitas*. XVI.
- Buto, Z. A. (2015). Modernisasi Dayah di Aceh. *Disertasi, Pascasarjana UIN SU Medan*.
- Daulay, H. P. (2001). *Historisitas dan Eksistensi: Pesantren Sekolah dan Madrasah*. Tiara Wacana Yogya.
- Dhofier, Z. (1984). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Guerra, J. M., Martínez, I., Munduate, L., & Medina, F. J. (2005). A Contingency Perspective on the Study of the Consequences of Conflict Types: The Role of

- 
- Organizational Culture. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 14(2), 157–176. <https://doi.org/10.1080/13594320444000245>
- Hamdan, H. (2017). Dayah dalam Perspektif Perubahan Sosial. *AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Budaya*, 8(1).
- Hanafiah. (2018). Dayah Collectively as a Social Movement. *International Journal of Human Rights in Healthcare*, 11. <https://doi.org/10.1108/IJHRH-08-2017-0034>
- Husaini, H. (2018). Strategi Guru Agama Islam dalam Pembinaan Akhlakul Karimah Siswa SMA Negeri I Bukit Kabupaten Bener Meriah. *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*, 2(1), 1–18.
- Laila, A. (2015). The Effective School: The Role of the Leaders in School Effectiveness. *Educational Research and Reviews*, 10(6), 695–721. <https://doi.org/10.5897/err2014.1986>
- Musthofa, M. (2015). Kedatangan Islam dan Pertumbuhan Pondok Pesantren di Indonesia Pespektif Filsafat Sejarah. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 2(1), 1–15.
- Nasional, D. P. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. *Tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Nurlaila, N., & Zulihafnani, Z. (2019). Pengaruh Fatwa Ulama Dayah dalam Masyarakat Aceh. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 21(2), 93–103.
- Octavia, S. A. (2019). *Implementasi Manajemen Bimbingan Konseling di Sekolah /Madrrasah*. Deepublish.
- Peraturan Gubernur Aceh No. 69 Tahun 2019. (2019). *Badan Akreditasi Dayah Aceh*.
- Prasetyo, M. A. M. (2017). Manajemen Unit Usaha Pesantren. *HIKMAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 18–36.
- Prasetyo, M. A. M., Bashori, B., & Masriani, M. (2020). Model Capacity Building Pada Pesantren Perbatasan Binaan Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 14(1), 71–96. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v14i1.71-96>
- Qanun Aceh No. 9 Tahun 2018. (2018). *Penyelenggaraan Pendidikan Dayah*. Aceh.
- Rosita, S., & Musnaini, D. M. F. (2020). *Commitment, Satisfaction and Motivation in Improving Organizational Citizenship Behavior and Its Impact on Lecturer Performance in Higher Education*. Universitas Jambi.
- Salabi, A. S. (2021). Pengembangan Karier Guru Di Pesantren Darul Ihsan Hampanan Perak Deli Serdang. *Continuous Education: Journal of Science and Research*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.51178/ce.v2i1.170>
- Scheerens, J., Luyten, H., & Ravens, J. van. (2011). *Perspectives on Educational Quality: Illustrative Outcomes on Primary and Secondary Schooling in the Netherlands*. London: Springer.
- Setyawan, M. A. (2019). UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 19–40. <https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-02>
- Siregar, F. A. (2017). Membangun Loyalitas Tenaga Pendidik. *IDARAH: Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan*, 1(1), 117–128.

- Situmorang, B. (2018). Model of Education Quality Management of Traditional Islamic Boarding Schools in Aceh. *3rd Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership (AISTEEL 2018)*, 685–687. Atlantis Press.
- Umiarso, & Zazin, N. (2011). *Pesantren di Tengah Arus Mutu Pendidikan: Menjawab Problematika Kontemporer Manajemen Mutu Pesantren*. Semarang: RaSAIL.
- Usman, A. S. (2021). Peran Dinas Pendidikan Dayah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Dayah di Aceh. *Intelektualita*, 10(01).
- Wahyuddin, W. (2017). Kontribusi Pondok Pesantren terhadap NKRI. *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman*, 3(01), 21–42.
- Zulfikar, Saiful Bahri, Muslem, Fatahillah, Amiruddin, & Muhibuttibri. (2020). The Da'wah Movement of Ulama Dayah (Analysis the Da'wah Movement of Têungkū Hasanoel Bashry). *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal*, 2(1), 90–99. <https://doi.org/10.33258/biohs.v2i1.146>